

**Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi
Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Kab. Grobogan**
(Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Grobogan)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

Galih Sudarsono
NIM. 12030110141183

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Galih Sudarsono
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141183
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN
INTERN, KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KAB.GROBOGAN (Studi Persepsi
Pegawai SKPD di Kabupaten Grobogan)**
Dosen Pembimbing : Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt.

Semarang, 19 Oktober 2016

Dosen Pembimbing,

(Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt.)
NIP. 196208131990011001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Galih Sudarsono
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141183
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN
INTERN, KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KAB.GROBOGAN (Studi Persepsi
Pegawai SKPD di Kabupaten Grobogan)**
Dosen Pembimbing : Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 19 Desember 2016

Tim Penguji :

1. Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt. (.....)
2. Dr. Warsito Kawedar., M.Si., Akt. (.....)
3. Drs. A. Santosa Adiwibowo., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Galih Sudarsono, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Grobogan (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Grobogan)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 19 Oktober 2016

Yang membuat pernyataan,

(Galih Sudarsono)
NIM. 12030110141183

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadaNya aku bertawakal.

(QS. At-Taubah: 129)

“hidup adalah perjuangan tanpa henti berusaha mengisi hari kemarin dan hari ini, esok lusa masih misteri”

“G.S.”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ibu, Ayah, dan Saudara tercinta

Dan teman- temanku

ABSTRACT

The purpose of this research to examine and analyze the influence of the internal control system, human resource competencies and application of local goverment financial accounting system to the information value of accounting entity financial..

The questionnaires amounted to 57 distributed to all the chief financial officer on employees of local government units (SKPD) the local government of Grobogan regency. Data were collected using questionnaire survey. The data were processed using SPSS version 21.0. The multiple linear regression analysis was employed to test research hypotheses.

The results of hypothesis testing show that the internal control system, human resource competencies and application of local goverment financial accounting system have significant positive effects on the information value of accounting entity financial reporting.

Keywords :internal control system, human resource competencies, application of local goverment financial accounting system, and the information value of accounting entity financial.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kuesioner yang berjumlah 57 dibagikan kepada seluruh kepala urusan keuangan pada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 21.0. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Daerah, dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat serta karunia-Nya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Grobogan (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Grobogan)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini atas segala bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suharnomo S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt.. Selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Dr. H. Rahardja, S.E., M.Si., Akt. Selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.
6. Kedua orang tua tercinta, adik-adikku, dan saudara-saudaraku terima kasih atas dukungan, doa, dan semangat yang diberikan hingga hari ini kepada penulis.
7. Terima kasih kepada Tamara Linawati yang sudah memberi semangat tanpa putus asa selama ini, dan tak henti hentinya memberi motivasi di kala sedang putus asa.
8. Teman-teman pria kelas C dicko suka penolong, Adhi Perdana the master of pencitraan, Waskito juragan LI, Rahardian penipu, Robby pecinta Devi, Vino sayang mama, Samuel jablay, Hanin, Adi Putra wes waras, Nurkholis preman pensiun, Kemal satu paket sama Alvin (ganda putra cina), Rizal ingin ke papua, Pradipta, Kahfi mabok, alm.Rizky Helmi, Yama, Dhatu, Danis, Christoper, dan Wahyu semoga kekeluargaan ini bisa terjaga sampai tua nanti.

9. Teman-teman wanita kelas C Bunga, Janet, Mayang, Mala, Dias, Riana, Dewi, Nurul, Christa, Margi, Lida, Juna, Nisa, Vira, Candra, Claudia, Cintia, Yessi, Icha, Hana, Intan, Gusrida yang telah melengkapi keceriaan selama kuliah di kampus tercinta ini.
10. Seluruh keluarga Alumni Akuntansi Reguler II yang telah menjadi keluarga kecil di kampus tercinta dan telah membantu dalam proses perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman KKN. Semoga tali silaturahmi diantara kita terus terjaga.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta doa hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan segala keterbatasan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat menjadi masukan untuk menghasilkan yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan yang luas bagi semua pihak.

Semarang, Oktober 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	18
1.3.1 Tujuan Penelitian	18
1.3.2 Manfaat Penelitian	18
1.4 Sistematika Penulisan	19
BAB II	21
TELAAH PUSTAKA	21
2.1 Landasan Teori	21
2.1.1 <i>Agency Theory</i>	21
2.1.2 <i>Stakeholder Theory</i>	23
2.1.3 <i>Laporan Keuangan dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan</i> Entitas Akuntansi	27
2.1.4 Pemerintah Daerah	31
2.1.5 Pelaporan keuangan pemerintah	35
2.1.6 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	35
2.1.7 Kompetensi Sumber Daya Manusia	38
2.1.8 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	39
2.2 Penelitian terdahulu	41
2.3 Kerangka Pemikiran	45
2.4 Pengembangan Hipotesis	47
2.4.1 Pengaruh SPI terhadap LKPD	48
2.4.2 Pengaruh Kompetensi SDM terhadap LKPD	50
2.4.3 Pengaruh Penerapan SAP Terhadap LKPD	52
BAB III	55
METODE PENELITIAN	55
3.1 Variabel Penelitian dan Devinisi Oprasional Variabel	55
3.1.1 Variabel Dependen	55
3.1.2 Variable Independen	58

3.2	Populasi dan Sampel	62
3.3	Jenis dan Sumber Data	64
3.4	Metode Pengumpulan Data	64
3.5	Metode Analisis Data	65
3.5.1	Uji Kompetensi Data	65
3.5.2	Analisis Statistika Deskriptif	67
3.5.3	Uji Asumsi Klasik	68
3.5.4	Analisis Regresi	70
3.5.5	Uji Goodness of Fit	71
BAB IV	74
HASIL DAN ANALISIS	74
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	74
4.2	Analisis Data	83
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	84
4.2.2	Uji Validitas	86
4.2.3	Uji Reliabilitas	90
4.2.4	Uji Asumsi Klasik	90
4.2.5	Uji Hipotesis	96
4.3	Pembahasan	103
4.3.1	Pengaruh SPI terhadap LKPD	103
4.3.2	Pengaruh Kompetensi SDM terhadap LKPD	104
4.3.3	Pengaruh Penerapan SAP terhadap LKPD	105
BAB V	107
KESIMPULAN DAN SARAN	107
5.1	Kesimpulan	107
5.2	Keterbatasan	108
5.3	Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	113
LAMPIRAN A	114
LAMPIRAN B	116
LAMPIRAN C	122

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 4.1 Rincian dan Pengembalian Kuesioner	74
Tabel 4.2 Responden Menurut Kelompok Umur	75
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	76
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Lama Kerja	77
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	77
Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Intern	78
Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia	80
Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	81
Tabel 4.9 Deskripsi Variabel Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah	82
Tabel 4.10 Analisis Statistik Deskriptif	84
Tabel 4.11 Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern	87
Tabel 4.12 Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia	88
Tabel 4.13 Uji Validitas Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .	88
Tabel 4.14 Uji Validitas Variabel Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah	89
Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian	90
Tabel 4.16 Hasil Uji Heteroskedastisitas	91
Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas	93
Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolonieritas	95
Tabel 4.19 Persamaan Analisis Regresi Berganda.....	96
Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi	98
Tabel 4.21 Hasil Uji Signifikansi Simultan	99
Tabel 4.22 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual	100
Tabel 4.23 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	102

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	47
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot	92
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot.....	94

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	114
LAMPIRAN B	116
LAMPIRAN C	122

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini dibahas beberapa alasan yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada kabupaten Grobogan. Selain itu rumusan masalah sebagai fokus penelitian, manfaat dan tujuan penelitian serta sistematika penulisan juga akan disajikan dalam bab ini. Berikut penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat, dan tujuan penulisan serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia pada saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008) dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial

(keuangan). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*). *Governmental Accounting Standards Board* (1999) dalam *Concepts Statements No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelapor keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya (seagov.org/concepts_statments/con_stmts_one.shtml).

Laporan keuangan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Penjekasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Kas Menuju AkruaI. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis AkruaI. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis AkruaI. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis AkruaI dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan

salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Laporan keuangan pemerintah diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Lampiran Peraturan Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;

- 2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- 1) masyarakat;
- 2) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- 3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- 4) pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum 28 untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan 29 demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan merupakan dasar dari pelaporan keuangan pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya (Pramudiarta dan Juliarto, 2015).

Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bisa dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini termasuk dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban (Halim 2008).

Menurut Suwardjono (2005) menyatakan bahwa informasi bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatanwaktuan (*timeliness*). Mengingat bahwa keterandalan dan ketepatanwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak, peneliti tertarik untuk meneliti hal apa yang mungkin mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Di dalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bab Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan (BPK RI, 2006). Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Arfianti, 2011). Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain :

- 1) Relevan, yang memiliki unsur-unsur berikut :
 - a) Manfaat umpan balik (*feedback value*).
 - b) Manfaat prediktif (*predictive value*).

- c) Tepat waktu (*timeliness*).
 - d) Lengkap.
- 2) Andal, yang memenuhi karakteristik berikut :
- a) Penyajian jujur.
 - b) Dapat diverifikasi (*verifiability*)
 - c) Netralitas
- 3) Dapat dibandingkan
- 4) Dapat dipahami

Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu: (1) relevan, adalah informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu; (2) andal, adalah informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi; (3) dapat dibandingkan, adalah informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya; (4) dapat dipahami, adalah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Menurut Penjelasan pasal 16 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria pemberian opini, adalah: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (Pramudiarta dan Juliarto, 2015).

Pada Semester I Tahun 2014, BPK telah memeriksa 456 LKPD Tahun 2013 dari pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah pemerintah daerah sampai dengan Semester I Tahun 2014 adalah 529. Hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang memberlakukan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual untuk pendapatan, belanja, aset, dan ekuitas paling lambat tahun 2015, mengungkapkan adanya kasus terkait ketidaksiapan

pemerintah daerah dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual yang terjadi pada 184 pemerintah daerah.

Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian suatu laporan keuangan. Adanya kenaikan persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta penurunan persentase opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP), secara umum menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Atas 456 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2013, sebanyak 54 LKPD mengalami peningkatan opini dari WDP menjadi WTP. Kenaikan opini tersebut disebabkan entitas telah melaksanakan perbaikan atas kelemahan dalam LKPD tahun sebelumnya. Terhadap 456 LKPD Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD (Badan Pemeriksa Keuangan, 2014).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Grobogan dalam tahun anggaran 2011 s/d 2014 mendapat penilaian dari BPK dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Keadaan ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Grobogan semakin membaik. Hal ini berarti beberapa LKPD Kabupaten Grobogan masih mengandung kelemahan-kelemahan dan belum mampu memenuhi kualitas informasi yang baik. Kelemahan-kelemahan tersebut salah satunya mungkin dipengaruhi dari kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan

daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang belum sepenuhnya diterapkan pada SKPD di Kabupaten Grobogan.

Kualitas laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan yang memiliki kriteria antara lain:

- 1) Kesesuaian dengan SAP;
- 2) Kecukupan Pengungkapan;
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat yang akan berpengaruh terhadap pemberian opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan. (LHP BPK-RI atas LKPD Groogan Tahun 2011-2014).

Permasalahan yang terjadi selama lima tahun terakhir dari Tahun 2011-2014 dalam setiap penyajian LKPD yaitu masih terdapatnya beberapa temuan tentang ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mana keduanya merupakan kriteria dari penilaian informasi keuangan yang disajikan sehingga dapat mempengaruhi opini dan kualitas LKPD tersebut. Kajian yang menarik perlu dipahami adalah penyajian laporan keuangan yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun, sampai saat ini penyajian laporan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah masih belum sesuai harapan. Kenyataan ini telah

ditemukan oleh BPK-RI melalui suatu sistem auditnya. Permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan oleh BPK-RI setiap tahun dalam pemeriksaan di Kabupaten Grobogan secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat;
- 2) Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan;
- 3) Terlambat menyampaikan laporan;
- 4) Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
- 5) Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai.
- 6) Sistem Pengendalian Intern belum memadai (Laporan hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Grobogan Tahun 2011-2014).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor sistem pengendalian intern, kompetensi SDM, dan sistem akuntansi keuangan daerah yang diduga mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh I Putu Upabayu Rama Mahaputra dan I Wayan Putra (2014) dan Sagung Intan Cahyani dan Nyoman Djinar Setiawina (2016) yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumberdaya

Manusia, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Gianyar dan Tabanan.

1.2 Rumusan Masalah

Hasil penelitian Sagung Inten Evicahyani dan Nyoman Djinar Setiawina (2016) menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh positif, Penerapan SAP, Pemanfaatan SIPKD dan Penerapan SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. Selanjutnya hasil penelitian I Putu Upaabayu Rama Mahaputra dan I Wayan Putra menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi akuntansi pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Tetapi dalam penelitian ini hanya diarahkan pada factor Kompetensi Sundrya Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern yang diduga mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

Kompetensi sumber daya manusia dalam konteks perwujudan laporan keuangan bagi siapa pun termasuk pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam rangkaperwujudan integritas keuangan, seperti yang dijelaskan oleh Widodo (2001) yaitu: “Kompetensi SDM adalah kemampuan SDM untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. SDM yang

berkompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. (Widodo dalam Kharis: 2010)”.

Masih lemahnya kompetensi SDM dalam pengelolaan keuangan pada SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang menjadi sampel dalam pemeriksaan BPK tahun 2011 s/d 2014 dapat diuraikan antara lain:

- 1) Pengelolaan Kas Daerah dan Kas BLUD belum optimal;
- 2) Pengelolaan Persediaan pada RSUD Dr. R Soedjati dan Dinas Bina Marga belum memadai;
- 3) Pengelolaan Aset Tetap kurang memadai;
- 4) Pengelolaan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Prata belum memadai;
- 5) Pengelolaan Kas di Bendaharan Pengeluaran pada 28 SKPD belum dilaksanakan dengan tertib.

Suatu prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengklasifikasian, dan melakukan ringkasan, bagi suatu transaksi keuangan serta pelaporan keuangan yang dikerjakan secara manual maupun komputerisasi sehubungan dengan pertanggungjawaban APBD adalah suatu cerminan sebuah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang merupakan perwujudan dari Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat atau diciptakan berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 (Halim: 2007). Sementara itu, penerapan sistem akuntansi yang andal dapat mempengaruhi kualitas LKPD (Mardiasmo: 2006).

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Kabupaten Grobogan juga belum memadai. Hasil pemeriksaan BPK pada SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang menjadi sampel dalam pemeriksaan tahun 2011 s/d 2014 dapat diuraikan antara lain:

- 1) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya;
- 2) Persediaan yang disajikan di Neraca tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya;
- 3) Nilai Investasi Non Permanen dalam Neraca tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya;
- 4) Realisasi Belanja Barang pada Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan substansi kegiatannya;
- 5) Penyajian Investasi Permanen belum sepenuhnya memadai;
- 6) Pertanggungjawaban atas Belanja Makan Minum belum memadai;

Sistem pengendalian Intern pemerintah merupakan hal yang sangat utama dalam kelangsungan pembangunan semua unsur pengendalian pemerintahan. Undang-undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP telah dipersiapkan seperti berikut: “SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai yang dilaksanakan secara terus menerus demi memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang andal, pengamanan terhadap aset Negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

60 Tahun 2008. SPIP juga dikatakan sebagai suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.(PP No. 60 Tahun 2008)''.

Hasil pemeriksaan BPK tahun 2011 s/d 2014 pada SKPD-SKPD yang dijadikan sampel pemeriksaan menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan masih belum memadai. Keadaan ini ditunjukkan dengan:

- 1) Pengendalian intern atas Pengajuan SPP-SPM dan Penerbitan SP2D tidak memadai;
- 2) Pengendalian intern atas Persediaan pada beberapa SKPD kurang memadai dan belum dilaksanakan dengan tertib;
- 3) Pengendalian intern Belanja Pegawai Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal dan PAUD belum dilaksanakan dengan tertib;
- 4) Pengendalian atas Pencairan Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa kurang memadai;
- 5) Kelemahan pengendalian intern atas asset tetap;
- 6) Sistem pengendalian intern atas Prosedur Pendataan, Penetapan, dan Penagihan Pajak dan Retribusi di DPPKAD belum sepenuhnya memadai;
- 7) Pengendalian atas Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial tidak melalui verifikasi oleh DPPKAD;
- 8) Kelemahan pengendalian atas Anggaran Belanja Daerah;
- 9) Pengendalian Kas Daerah dan Kas BLUD belum memadai;

Berdasarkan uraian-uraian didepan selanjutnya dapat disusun rumusan masalan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan ?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan ?
3. Bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Pada bagian ini akan disebutkan dan dijelaskan tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan entitas akuntansi pemerintah daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan entitas akuntansi pemerintah daerah.
3. Untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan entitas akuntansi pemerintah daerah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Aspek praktis

Manfaat yang dapat diambil dari aspek praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi pemerintah daerah Kabupaten Grobogan dalam bidang DPPKAD untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama hingga bab terakhir. Hal ini dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami isi penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diajukan berdasarkan teori yang digunakan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari uraian variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, penjelasan metode penentuan populasi, sampel, jenis, dan sumber data serta penjelasan tentang metode pengumpulan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data, interpretasi hasil dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.